



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga  
Kode Pos 93672

---

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum disamping bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, juga meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk tim pengelola;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Buton Utara, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Pengarah

memberikan arahan dan dukungan kebijakan serta bimbingan dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Pelaksana

a. melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

b. menginput data atau mengupdate berbagai menu yang tersedia dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 8-1-2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	Mandyr	As. I	9
2	Marah	Ku. HL	2

a.n. BUPATI BUTON UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. Tim Pengelola yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium atau Jasa Per Bulan (Rp)
1	Dr. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si	Bupati Buton Utara	Pengarah	600.000
2	Ahali, S.H.,M.H.	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	600.000

B. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium atau Jasa Per Bulan (Rp)
1	Muh. Hardhy Muslim.,S.H.,M.Si.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	550.000
2	Mansur, S.Sos, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua	500.000
3	H. Tasir, S.E.,M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua	450.000
4	La Ode Mardan Mahfudz, S.E.,M.H.	Kabag Hukum Setda	Sekretaris/ Administrator	500.000
5	Rahmad Ntete, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda	Anggota	450.000
6	Fathiyatul Asrariyah Ali Nurdin, S.H.	Analisis Hukum Setda	Anggota	450.000
7	Hamsil, S.Sos,M.M.	Kasubag Protokol Setda	Anggota	450.000
8	Jumadil Paisal, S.H., M.H.	Analisis Hukum Setda	Anggota	450.000

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mansur	As. I	le
2	Muh	Kab. Hk	le

a.n. BUPATI BUTON UTARA  
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM